

EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP

Nur Inna Alfiyah¹, Ida Syafriyani²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Wiraraja

Email: nurinna@wiraraja.ac.id¹, idadafisipunjia@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to measure the effectiveness of the Minapolitan area in improving community welfare. Until now poverty is a never ending problem to be examined, various policy formulas have been issued to reduce and alleviate poverty. One of them is the Minapolitan program which aims to develop a more productive economic area, so that people are able to be independent. Sumenep as one of the areas selected for the development of the Minapolitan area, with the existence of the Minapolitan program, provides benefits for the government in an effort to reduce poverty levels in Sumenep, especially in coastal areas where most of the people depend on marine products. The research method uses a qualitative method with a descriptive approach. The results showed that the Minapolitan program, especially in Saronggi District, was able to provide changes for the community, especially for fish and seaweed cultivators, these changes can be seen from the results of production which have an impact on the economic independence of the community.

Keyword: *Poverty, effectiveness, Minapolitan*

PENDAHULUAN

Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah pulau pada tahun 2018 dalam buku statistik Indonesia berjumlah 16.056 pulau. Banyaknya pulau tersebut mengakibatkan Indonesia di kelilingi oleh lautan, dengan dua pertiga luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia (± 81.000 km) yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia (<http://www.perumperindo.co.id>, di akses 12-02-2020). Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang tentu wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki banyak keaneka ragaman sumber daya baik dari sektor perikanan, terumbu karang hingga

minyak bumi dan gas. Banyaknya sumber daya tersebut jika dimanfaatkan tentu akan memberikan keuntungan bagi Indonesia sendiri terutama dalam memberikan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Perikanan di Indonesia diperkirakan berpotensi sebesar 6,5 juta ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton/tahun atau $\pm 80\%$ dari potensi lestari.

Berdasarkan JTB tersebut yang baru dimanfaatkan hanya sebesar 4 juta ton (pada tahun 2002 atau baru 78,13%). Peluang pasar hasil perikanan dapat dibagi menjadi pasar domestik dan luar negeri. Pasar domestik di Indonesia ± 220 juta penduduk dan konsumsi protein per kapita ± 22 kg/kapita/tahun. Sedangkan peluang pasar ekspor antara lain ke Jepang (40%), USA (15%), Eropa (20%), RRC (10%), Hongkong (5%), Singapura (5%) dan negara lainnya (5%). Badan Pusat Statistik mencatat, subsektor perikanan mempunyai

peluang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2015 sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 1,41% terhadap PDB Indonesia dengan laju pertumbuhan pertahunnya yaitu sebesar 15,79 % diatas PDB Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan angka pertumbuhan di Tahun 2017 yang mencapai Rp. 227,3 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,95% atau naik 15,33% dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,15% (<http://kkp.go.id>).

Potensi yang dimiliki dalam sektor perikanan tidak hanya sebatas pada besarnya SDA saja, potensi lain yang dimiliki dan perlu untuk terus dikembangkan dan disejahterakan ialah sumber daya manusianya terutama yang hidup di daerah pesisir yang masih perlu untuk disejahterakan. Hal ini didasarkan pada tidak semua masyarakat yang tinggal dikawasan pesisir dapat hidup makmur dan sejahtera, karena banyak masyarakat yang berada dikawasan pesisir menghadapi berbagai masalah yang menyebabkan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa dan 61,36 persen% di antaranya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dan pedesaan (BPS. 2018. Diakses di <https://www.bps.go.id>). Kemiskinan merupakan problem besar pemerintah, yang sampai saat ini masih belum ada solusi paten dalam upaya pengetasan kemiskinan tersebut. Segala formula dan cara pengentasan kemiskinan telah diluncurkan baik oleh organisasi-organisasi internasional hingga upaya dari pemerintah negara sendiri dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. Di Indonesia, upaya pengentasan kemiskinan dikeluarkan dalam berbagai bentuk kebijakan dengan program-program yang ada. Oleh karena itu untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi di daerah pesisir maka dibutuhkan kebijakan pemerintah sebagai salah satu solusi dalam menghadapi kemiskinan tersebut. Salah satu bentuk kebijakan dalam upaya mengurangi kemiskinan di daerah pesisir adalah munculnya program minapolitan yang

dicetuskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia sebagai wadah dalam menangani kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan tentu ini menjadi salah satu tugas penting bagi kementerian untuk merealisasikan kesejahteraan tersebut. Dimana melalui misinya KKP telah menetapkan beberapa strategi yang menjadi acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara umum, antara lain; *pertama*, memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi. *Kedua*, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. *Ketiga*, Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan. *Keempat*, memperluas akses pasar domestik dan internasional (Bank Indonesia.2015). Berdasar pada misi dari KKP, tentu dalam upaya mewujudkan misi tersebut membutuhkan program yang mampu merepresentasikan tujuan-tujuan dalam upaya mengurangi kemiskinan bagi daerah pesisir. Salah satu langkah yang diambil oleh KKP adalah dengan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Minapolitan. Minapolitan sendiri merupakan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan (<http://perpustakaan.bappenas.go.id>).

Untuk menerapkan kebijakan tersebut dibutuhkan strategi pengembangan keterkaitan antar kawasan yang meliputi tata kelola ekonomi daerah, kualitas/ kompetensi SDM, infrastruktur, *public private partnership*, serta fasilitasi pengembangan ekonomi lokal daerah. Hal ini diperlukan sebagai syarat untuk fokus pada lokasi untuk pengembangan kawasan andalan, pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti kawasan industri berbasis kompetensi inti industri daerah berbentuk kluster kawasan sentra produksi, kawasan perkotaan baru, pengembangan kawasan agropolitan maupun kawasan Minapolitan. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan PAD melalui pengembangan produk unggulan dengan disertai jaminan pasar. Pada tahun 2011, KKP menetapkan sedikitnya 45 kabupaten/kota dari 33 provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan minapolitan (<https://regional.kompas.com>).

Kabupaten Sumenep sebagai wilayah yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, mejadikan Sumenep sebagai salah satu wilayah sasaran dalam program minapolitan. Terlebih lagi Sumenep memiliki desa perikanan yang berjumlah 170 desa dengan jumlah nelayan dan petani ikan sebanyak 41.810 nelayan (BPS Kab.Sumenep 2018, <https://sumenepkab.bps.go.id>). Banyaknya jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dan petani ikan menjadi perhatian pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sehingga diperlukan adanya formula untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut, terlebih lagi kondisi kemiskinan di wilayah Sumenep yang masih terbilang cukup tinggi. Peningkatan penduduk miskin diakibatkan perubahan garis kemiskinan yaitu tingkat pendapatan seseorang rata-rata saat ini sebesar 340 ribu 33 rupiah perkapita perbulan (Rukayah, <http://rri.co.id>). Untuk wilayah pesisir di Kabupaten Sumenep, masyarakat hanya bergantung terhadap tinggi dan rendahnya gelombang yang menjadikan pendapatan mereka tidak menentu. Sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan dengan kerjasama bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengembangan kawasan ekonomi berbasis perikanan budidaya terintegrasi (minapolitan). Program minapolitan sendiri di dalam pemerintah daerah terutama dinas perikanan masuk dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep tahun 2013-2033 yaitu sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri, sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing

daerah tanpa melupakan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam (Renstra 2018, <http://dataprimer.sumenepkab.go.id>).

Pengembangan kawasan minapolitan sendiri di Sumenep sudah dimulai pada tahun 2010 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/Men/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan dengan tiga kecamatan yang menjadi wilayah pengembangan minapolitan yaitu Kecamatan Saronggi, Kecamatan Bluto, Kecamatan Pasongsongan. Pemilihan tiga kecamatan tersebut didasarkan letak wilayah yang berdekatan dengan laut, diantara tiga wilayah minapolitan tersebut Kecamatan Saronggi menjadi pusat pengembangan minapolitan yang dilihat dari porsi pendapatan masyarakat yang sebagian masih bergantung terhadap pendapatan laut yang tidak menentu. Sehingga dengan adanya latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Kecamatan Saronggi, Sumenep. Urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana efektivitas pengembangan kawasan minapolitan yang berjalan di Kecamatan Saronggi nantinya menjadi percontohan bagi wilayah pesisir lain di Sumenep. Sehingga nantinya akan membentuk masyarakat yang mandiri dalam mengelola perkonomian mereka. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah terkait bagaimanakah Efektivitas Pengembangan Kawasan Minapolitan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Saronggi Kab.Sumenep, dengan melihat bagaimana Pemahaman Program dilakukan, Sasaran program, pelaksanaan program yang Tepat Waktu hingga tercapainya Tujuan Program serta Perubahan Nyata dari

implementasi program minapolitan bagi masyarakat Kec. Saronggi.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas dan Indikator Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan publik, dimana untuk mengukur sukses atau tidaknya kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah maka dibutuhkan kajian atau pembahasan terkait efektifitas dari kebijakan atau program yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang diutarakan oleh Gitosudarmo dalam Sutrisno (2016 : 145) mengatakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat atau derajat pencapaian hasil yang diharapkan. Semakin besar hasil yang dapat diraihinya berarti menjadi semakin efektif. Selanjutnya Akmal dalam Priansa (2015 : 11) juga menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (doing the right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil.

Menurut Steer dalam Sutrisno (2016:89) berpendapat bahwa pada umumnya efektivitas dikaitkan dengan tujuan organisasi yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Menurutnya bahwa yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan: (1) optimalisasi tujuan-tujuan; (2) prespektif sistem; dan (3) tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi. Upaya untuk menukur efektivitas sebenarnya tidak bisa dipisahkan dengan kriteria lainnya yaitu rasionalitas dan efisiensi. Ketiga kriteria ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dalam rangka keberhasilan dari berbagai rangkaian kegiatan manusia dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintahan maupun dunia bisnis. Dari segi kriteria efektifitas, unsur-unsurnya antara lain (Makmur,2015:7-8); 1) Ketepatan waktu, waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan

yang dilakukan dalam sebuah organisasi. 2) Ketepatan perhitungan biaya, dalam unsur ini ditekankan pada ketepatan dalam pemanfaatn biaya terhadap suatu kegiatan.3) Ketepatan dalam pengukuran, setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa mempunyai ukuran keberhasilan tertentu. 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan. 5) Ketepatan berpikir, dalam unsur ini ketepatan berpikir akan melahirkan keefektivan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.6) Ketepatan dalam melakukan perintah. 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan, sehingga tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.8) Ketepatan-ketepatan sasaran. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi.

Menurut Sutrisno (2016: 125-126) dalam mengukur efektivitas terdapat 5 indikator yaitu; a) Pemahaman Program, b) Tepat Sasaran, c) Tepat Waktu, d) Tercapainya Tujuan, e) Perubahan Nyata. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2014:77), yaitu: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai. 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan

sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya. 8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kemiskinan

Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada. Menurut Todaro (2012:80) kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya; **a)** Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan. **b)** Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.

Pengembangan Kawasan Minapolitan

Menurut Rustiadi, dkk (2011:150) pengembangan kawasan atau wilayah dapat dianggap sebagai suatu bentuk intervensi positif terhadap pembangunan di suatu wilayah, diperlukan strategi-strategi yang efektif untuk suatu percepatan pembangunan. Pengembangan kawasan atau wilayah bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemerataan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi antar wilayah; (2) meningkatkan pemerataan dalam tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antar wilayah; (3) memperkuat struktur perekonomian nasional dan regional. Perencanaan pengembangan kawasan atau wilayah harus dilakukan secara keterkaitan antar sektor dan antar wilayah serta bersifat dua arah dari pembangunan nasional untuk memperkuat pembangunan regional yang ditunjukkan oleh tercapainya peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah dan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi, yang secara keseluruhan mencerminkan keberhasilan pembangunan secara menyeluruh (Adisasmita, 2015:3). Sedangkan Minapolitan adalah kota atau kawasan perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan. (Sekjen KKP, 2013:10)

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan, disebutkan bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip – prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Minapolitan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, (b) meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, dan (c) meningkatkan sektor kelautan

dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional (Sekjen KKP, 2013:16).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan penjelasan kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sumenep, khususnya di Kecamatan Saronggi sebagai salah satu daerah penerima program minapolitan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan survey langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder di dapat melalui data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah bersifat diskriptif naratif. Fokus kajian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada lima indikator efektivitas menurut Sutrisno (2016: 125-126) yaitu; a) Pemahaman Program, b) Tepat Sasaran, c) Tepat Waktu, d) Tercapainya Tujuan, e) Perubahan Nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Program Minapolitan

Secara definitif Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya, dengan ciri utama kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan (Sekjen KKP, 2013:10). Kemudian menurut Sekjen KKP (2013:16) Minapolitan bertujuan untuk: (a) meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil, (b) meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, dan (c) meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional. Program Minapolitan yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menciptakan *blue economy* yang berartipemanfaatan dan pengembangan wilayah-wilayah kelautan dan

pesisir yang memiliki nilai ekonomis sehingga tingkat perekonomian di wilayah-wilayah tersebut dapat terangkat atau menyerupai kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan.

Kabupaten Sumenep memulai program Minapolitan dari tahun 2017. Desa Tanjung Kecamatan Saronggi merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumenep yang telah menerapkan program Minapolitan. Sebelum dilaksanakan program Minapolitan di Desa Tanjung, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang Program Minapolitan. Dinas Perikanan sendiri dalam upaya mensosialisasikan program minapolitan tidak serta merta selalu menggunakan cara yang formal, terkadang inovasi mereka dalam mengupayakan agar sosialisasi berhasil dan para Pokdakan memahami harus menggunakan cara-cara tersendiri dalam penyampaiannya.

Meskipun dalam penyampaiannya para anggota Pokdakan kurang bisa menjelaskan tahapan-tahapannya, namun minimal mereka sudah paham akan tahapan-tahapan tersebut sehingga bisa dikatakan Dinas Perikanan mampu membuat para Pokdakan memahami yang harus mereka lakukan agar produksi mereka dapat terus meningkat sesuai sasaran. Hal ini sesuai dengan salah satu indikator efektivitas indikator yaitu terkait dengan pemahaman program menurut Sutrisno (2016:125-126) bahwa suatu program atau kebijakan akan berjalan efektif jika para pelaku program atau kebijakan tersebut dapat memahami program yang akan dijalankan.

Pihak warga atau pembudidaya yang kurang paham atau tidak mengerti pasti akan merasa tidak cocok dengan apa yang sudah disosialisasikan, hal ini dikarenakan pada saat sosialisasi beberapa pembudidaya tidak mengikutinya dikarenakan harus bekerja di laut ataupun urusan lainnya. Namun, mereka tetap optimis bahwa meskipun mereka tidak paham atau kurang mengerti, hal tersebut tidak mengganggu hasil produksi mereka.

Selanjutnya dalam mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat lokal/perdesaan melalui konsep minapolitan

dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sebagai unsur pendukung terhadap terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Adapun sarana prasarana yang dibutuhkan dan diberikan oleh pemerintah dalam klaster rumput laut ini berupa paket bantuan bibit rumput laut model rakit dan paket bantuan bibit rumput laut model longline. Paket bantuan bibit rumput laut model rakit terdiri dari sarana utama yaitu bibit starter rumput laut (kultur jaringan) sebanyak 200 kg dan peralatan yaitu tali ris no.5 12 kg, tali ikat no.2DN sepanjang 500m, bambu sebanyak 9 batang, serta jangkar

sebanyak 2 buah. Kemudian untuk paket bantuan bibit rumput laut model longline terdiri dari sarana utama yaitu bibit starter rumput laut (kultur jaringan) sebanyak 200 kg, dan peralatan yaitu tali ris no. 5PE 9 kg, tali ikat No. 1,5 PE sepanjang 750 m, serta tali utama / As No. 12 PE 22 kg..

Tabel.1

Paket Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Model Rakit

No.	Bahan	Volume
A	Sarana Utama	
1	Bibit Starter Rumput Laut (Kultur Jaringan)	200 Kg
B	Peralatan	
1	Tali Ris No. 5	12 Kg
3	Tali Ikat No. 2 DN	500 m
4	Bambu	9 Batang
5	Jangkar	2 Buah

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Tabel.2

Paket Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut Model Longline

No	Bahan	Volume
A	Sarana Utama	
1	Bibit Starter Rumput Laut (Kultur Jaringan)	200 Kg
B	Peralatan	
1	Tali Ris No. 5 PE	9 Kg
3	Tali Ikat No. 1,5 PE	750 m
4	Tali Utama / As No. 12 PE	22 Kg

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah tersebut dalam pemenuhan kebutuhan kegiatan masih dirasa kurang terutama dalam hal anggaran, oleh karena itu efisiensi harus selalu ditekankan dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam penyediaan kebutuhan sarana prasarana merupakan hal yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program. Hal tersebut dapat menjadi penyebab tidak tercapainya target dan tujuan yang diinginkan.

Tepat Sasaran

Ketepatan sasaran merupakan unsur penentu berhasil tidaknya suatu program atau kebijakan yang dijalankan. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berjalan selaras dan menghasilkan output yang diinginkan. Menurut Makmur (2015:7-8), penentuan sasaran yang tepat dan baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan secara organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Sasaran utama yang menjadi tujuan Dinas Perikanan Kabupaten lebih banyak berfokus dalam masalah hasil produksi, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi perikanan. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pembahasan penentuan tujuan, sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.

Beberapa faktor seperti cuaca yang tak menentu, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta kualitas sumber daya manusia yang kurang, turut mempengaruhi terhadap hasil produksi dan capaian target atau sasaran yang telah ditentukan. Kondisi alam merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan hasil dan kualitas produksi.

Setiap program mempunyai indikator-indikator tertentu dalam mengukur sejauh mana tingkat keberhasilannya. Indikator yang dipakai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep sendiri

dalam mengukur tingkat keberhasilan program minapolitan adalah melalui hasil produksi, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ekonomi perikanan.

Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir sebagai tujuan utama program minapolitan berjalan selaras dengan visi misi Kabupaten Sumenep. Sehingga kedepannya hal tersebut dapat memberikan dampak yang besar baik terhadap masyarakat maupun Dinas Perikanan selaku OPD terkait merencanakan kebijakan mengenai Minapolitan dengan melihat kebutuhan-kebutuhan dari daerah Desa Tanjung itu sendiri dan masalah perekonomian dan peningkatan hasil produksi merupakan hal mendasar yang menjadi tolak ukur untuk pengambilan suatu kebijakan. Program minapolitan sebagai *blue economy* harus mampu menciptakan *multiplier effect* bagi daerah atau masyarakat sekitarnya. Peningkatan kegiatan perekonomian sebagai adanya dampak dari program minapolitan akan secara otomatis berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakatnya.

Kebiasaan warga dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling bergotong royong dan saling mendukung satu sama lain dalam hal pembudidayaan merupakan faktor pendukung keberhasilan program karena dengan pola pikir seperti itu akan membuat warga semakin mandiri dalam mengelola usaha mereka. Keadaan ekonomi penerima program minapolitan ikut terbantu meskipun tidak terlalu signifikan. Musyawarah dan saling membantu satu sama lain menjadi solusi bersama dalam menutupi kekurangan-kekurangan yang ada.

Tepat Waktu

Rentang waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan minapolitan adalah satu tahun dan selebihnya tergabung ke dalam kelompok budidaya ikan atau Pokdakan. Menurut Makmur (2015:7-8), waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam

sebuah organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Namun mulai dari tahun 2016, kewenangan di bidang kelautan yang diambil oleh pemerintah provinsi menjadi hambatan serius bagi Dinas Perikanan, karena mereka saat ini sudah tidak lagi memiliki kewenangan mereka di bidang kelautan. Hal ini membuat mereka hanya bisa sebatas membantu dalam hal monitoring, evaluasi dan pelaporan saja sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan inovasi-inovasi dikarenakan semuanya diambil alih dan sudah diatur oleh pihak pemerintah provinsi.

Program minapolitan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep pernah menjadi wilayah percontohan dalam kawasan minapolitan selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Program Minapolitan di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep berlandaskan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 tentang minapolitan yang kemudian pada tahun 2011 telah ditetapkan 24 (dua puluh empat) lokasi sentra produksi perikanan budidaya sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.70/DJ-PB/2010 Tentang Penetapan 24 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Percontohan Tahun 2011 Kabupaten Sumenep termasuk ke dalam lokasi sentra perikanan budidaya di bidang klaster rumput laut.

Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2012 keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan bidang perikanan dan kelautan dibuktikan dengan masuknya Kabupaten Sumenep menjadi wilayah percontohan dalam Kawasan Minapolitan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP. 123/DJ-PB/2011 tentang Penetapan 46 lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2012. Hal tersebut terus dipertahankan Kabupaten Sumenep dengan tetap menjadi wilayah percontohan seperti yang disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP.240/DJ-PB/2012 tentang Penetapan 87 Lokasi Sentra Produksi Perikanan Budidaya sebagai Kawasan Minapolitan Percontohan Tahun 2013.

Bahkan pada tahun kelima pun Kabupaten Sumenep tetap menjadi wilayah percontohan sehingga menjadi wilayah prioritas dalam penerapan teknologi terbaru untuk meningkatkan produksi hasil perikanan budidaya. Terpilihnya Kabupaten Sumenep sebagai daerah percontohan menandakan bahwa ada kemajuan atau perkembangan terkait program minapolitan. Keberhasilan tersebut seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi sebagai wujud keberhasilan daerah percontohan.

Tabel.3

Produksi dan Nilai Produksi Budidaya Rumput Laut

No.	Keterangan	2017	2018	2019
1.	Produksi Basah/ Ton	66.278,941	146.319,50	140.358,01
2.	Nilai Produksi/Rp. 000	265.115.764,00	438.958.500,00	701.790.040,00

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2019

Tercapainya Tujuan

Akmal dalam Priansa (2015 : 11) menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the*

right things) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Penyelarasan antara tujuan dan output yang dihasilkan baik antara pemerintah pusat dan daerah merupakan hal yang paling mendasar dalam mewujudkan keberhasilan

program itu sendiri. Minapolitan sendiri merupakan upaya pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Pengembangan Kawasan minapolitan adalah langkah yang diambil pemerintah dalam menciptakan *blue economy* dengan tujuan dapat mengangkat perekonomian daerah Kawasan pesisir.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu penghasil komoditas rumput laut terbesar di Jawa Timur. Budidaya rumput laut yang bertempat di Kecamatan Saronggi telah berlangsung cukup lama dari tahun ke tahun, dengan adanya pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Saronggi potensi rumput laut dapat dikembangkan menjadi olahan yang mempunyai nilai jual yang tinggi, sehingga dapat berdampak terhadap pendapatan masyarakat pesisir.

Menurut Makmur (2015:7-8), organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, sehingga tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang. Tujuan yang diharapkan dapat dikatakan berhasil karena dilihat dari hasil produksi dan nilai produksi budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi meningkat signifikan dari tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun 2017, produksi basah sebanyak 66.278,941 ton dan nilai produksinya sebesar Rp. 265.115.764,00. Pada tahun 2018, produksi basah sebanyak 146.319,50 ton dan nilai produksinya sebesar Rp. 438.958.500,00. Pada tahun 2019, produksi basah sebanyak 140.358,01 ton dan nilai produksinya sebesar Rp. 701.790.040,00.

Perubahan Nyata

Setiap program yang dikeluarkan oleh pemerintah baik yang berupa suatu kebijakan seperti pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sumenep khususnya Kecamatan Saronggi diharapkan dapat memberikan

perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan daerah atau kawasan sebagai tempat implementasi kebijakan. Perubahan tersebut tentunya adalah perubahan yang positif untuk pengembangan daerah .

Perubahan nyata harus dirasakan oleh masyarakat dan harus terwujud sebagai bentuk keberhasilan program tersebut. Perubahan dapat dilihat dari inovasi program dan manfaat terhadap masyarakat. Program minapolitan di Kecamatan Saronggi memiliki banyak sub program yang dijalankan seperti program pengadaan bibit unggul, pengembangan demfarm metode longline dan metode rakit. Namun selain itu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat maka program yang dilakukan langsung pada sasaran utama yaitu masyarakat dengan mensosialisasikan cara pengolahan rumput laut, membentuk Pokmas-pokmas untuk mengawasi secara langsung jalannya perekonomian dan pada saat itu juga kami mengadakan program pengembangan wirausahawan muda dalam usaha penumbuhan pembibitan rumput laut.

Program minapolitan sendiri telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Saronggi. Banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan berupa bibit unggul sehingga pendapatan masyarakat menjadi lebih meningkat karena faktor bibit unggul yang dapat meningkatkan produksi sekaligus pelatihan yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kawasan minapolitan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Saronggi dapat dikatakan efektif sebab tujuan yang diharapkan berjalan sesuai rencana. Berikut ini penjelasan lebih rinci berdasarkan fokus penelitian; *pertama*, Para anggota Pokdakan sudah paham akan tujuan program tersebut sehingga bisa dikatakan Dinas

Perikanan mampu membuat para Pokdakan memahami apa yang harus mereka lakukan agar produksi mereka dapat terus meningkat sesuai sasaran meskipun masih ada beberapa Pokdakan yang belum mengikuti Standar Operasional dengan alasan terlalu rumit. *Kedua*, Keadaan ekonomi penerima program minapolitan ikut terbantu meskipun tidak terlalu signifikan. Hal tersebut sesuai dengan sasaran utama yang menjadi tujuan Dinas Perikanan Kabupaten yaitu peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sehingga program minapolitan dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. *Ketiga*, Pelaksanaan program dalam setahun dapat diselesaikan meskipun mulai dari tahun 2016, kewenangan di bidang kelautan yang diambil oleh pemerintah provinsi menjadi hambatan serius bagi Dinas Perikanan. *Keempat*, Tujuan yang diharapkan dapat dikatakan berhasil karena dilihat dari hasil produksi dan nilai produksi budidaya rumput laut di Kecamatan Saronggi meningkat dari tahun 2017 sampai 2019. Selain itu Program Minapolitan di Kabupaten Sumenep menjadi wilayah percontohan selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2011.

Saran

- a. Sebaiknya Standar Operasional yang ada dibuat lebih sederhana menyesuaikan dengan keadaan daerah program agar para anggota Pokdakan dan pembudidaya lebih mudah memahaminya lagi.
- b. Sarana dan prasarana yang diberikan untuk pembudidaya sebaiknya lebih ditingkatkan kembali sehingga hasil produksinya juga dapat ikut meningkat.
- c. Karena mulai tahun 2016 program minapolitan diambil alih pemerintah pusat, alangkah lebih baiknya program tersebut dikembalikan lagi ke pemerintah daerah yang bersangkutan agar memiliki kewenangan mengelola daerah pesisir dengan lebih efektif.
- d. Diharapkan di tahun-tahun berikutnya program minapolitan terus berjalan dan terus

berkembang agar masyarakat Kabupaten Sumenep ekonominya dapat terangkat.

REFERENSI

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2015. *Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan
- Priansa, Donni Juni dan Agus Grindra. 2015. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: ALFABETA
- Rustiadi, Ernan, dkk, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Ed. Andrea Emma Pravitasari, Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor
- Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2013. *Pengembangan Kawasan Minapolitan*
- Siagian, P Sondang . 2014. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edy. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Cetak ke Enam. Jakarta: Pranada Media Group.

Dokumen dalam Website

- KKP. (2016). *Laporan Kinerja*. Diakses dari <http://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kkp/LKJ-KKP-2016-Revisi-18-Mei-2017-1.pdf>
- BAPPENAS. (2013). *Pengembangan Kawasan Minapolitan*. Diakses dari [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143574-\[Konten\]-Konten%20D119.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/143574-[Konten]-Konten%20D119.pdf)

BPS. (2018). *Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970 – 2017*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>

BAPPEDA. (2018). *RPJMD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2016-2021*. Diakses dari <http://bappeda.sumenepkab.go.id/publikasi/files/RPJMD/RPJMD2016-2018.pdf>

Artikel Berita dalam Website

Rukayah. (2019, Maret 25). *Kemiskinan Sumenep Naik 0.54 Persen*. Diakses dari <https://rri.co.id/daerah/653059/kemiskinan-sumenep-naik-0-54-persen>